

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 2 Agustus 1990 Irak melancarkan invasi militer terhadap Kuwait dan hal itu sangat mengejutkan dunia internasional. Banyak negara dan masyarakat internasional mengecam tindakan Irak tersebut dan meminta agar Irak segera mundur dari Kuwait tanpa syarat. Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan resolusi dengan memberikan sanksi ekonomi terhadap Irak dan meminta Irak segera mundur dari Kuwait. Perdebatan di Dewan Keamanan cukup sengit apakah perlu menggunakan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait atau memberikan cukup waktu bagi Irak dengan memberikan sanksi ekonomi saja, dengan harapan krisis internasional dapat diselesaikan dengan cara-cara damai dan diplomasi. Karena Irak tidak bergeming dengan resolusi-resolusi damai yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, maka akhirnya Dewan Keamanan PBB memutuskan penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait.

Amerika Serikat yang merasa kepentingan nasionalnya di Timur Tengah terancam terutama menyangkut cadangan strategis minyaknya di Arab Saudi dan Kuwait, segera melakukan antisipasi dengan membangun kekuatannya di Kawasan Teluk guna membantu Arab Saudi dalam menghadapi agresi Irak<sup>1</sup>. Pada akhir bulan Nopember 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada “pemerintah negara-negara anggota PBB bekerjasama dengan Kuwait untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan memulihkan keamanan dan perdamaian dunia di kawasan tersebut “ (*the governments cooperating with Kuwait to take all necessary measures to uphold its resolutions and to restore international peace and security in the area*).<sup>2</sup> Penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait ini merupakan contoh keberhasilan PBB dalam menjalankan peranannya untuk

---

<sup>1</sup> Carroll Payne, *The Gulf War and It's Impact on UN Peacekeeping*, World Conflict Quarterly, February 2001, hal.1

<sup>2</sup> Liu,F.T, *The History of United Nations Peace Keeping Operations Following the Cold War: 1988 to 1997*, Unitar Poci, New York, 1998, Hal.26

menyelesaikan konflik internasional dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional.

Invasi Irak terhadap Kuwait itu dilatarbelakangi masalah ekonomi dalam negeri Irak pasca Prang Iran-Irak, ambisi Presiden Irak Saddam Hussein, sejarah masa lalu Irak dan kepentingan nasional Irak. Setelah Perang Iran-Irak usai pada tahun 1988, Pemerintah Irak mengalami kesulitan keuangan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaannya. Perekonomian Irak sangat tergantung kepada minyak yang memberikan 95% devisa negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahannya<sup>3</sup>. Pada tahun 1989 harga minyak dunia mencapai titik yang sangat rendah, sehingga pendapatan negara dari minyak tidak mampu mendukung kebutuhan biaya rekonstruksi yang sangat besar akibat perang dan kebutuhan membiayai Angkatan Bersenjata serta untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi rakyatnya yang sebagian besar dari impor. Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 1989 Presiden Saddam Hussein melakukan perubahan Tim Ekonominya dan melaksanakan pengurangan pegawai sipil dan tentaranya. Namun hal itu justru mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan makin mempersulit perekonomian Irak<sup>4</sup>.

Dalam situasi yang sangat sulit, Presiden Saddam Hussein meminta OPEC untuk menaikkan harga minyak melalui pembatasan kuota bagi negara-negara pengekspor minyak anggota OPEC. Kepada Arab Saudi dan Kuwait, Irak meminta agar kedua negara membebaskan hutangnya sebesar 40 Milyar US Dollar yang diberikan selama Perang Iran-Irak. Irak mengharapkan tidak sebagai hutang namun sebagai pemberian cuma-cuma (*grand*)<sup>5</sup>. Irak juga meminta agar Arab Saudi dan Kuwait membantu Irak dalam upaya rekonstruksi perekonomiannya dengan memberikan konsesi minyak di kedua negara tersebut. Namun Arab Saudi maupun Kuwait menolak dengan tegas permintaan Presiden Saddam Hussein tersebut. Jawaban yang mengecewakan itu membuat Presiden Saddam Hussein sangat marah dan mengancam kedua negara tersebut dengan ancaman kekerasan. Pada pertengahan tahun 1990, Presiden Saddam Hussein menyatakan bahwa apabila Arab Saudi dan Kuwait tidak memberikan bantuan ekonomi dan konsesi minyaknya, maka Irak akan menggunakan

---

<sup>3</sup> Anthony H. Cordesman and Ahmed S. Hashim, *Iraq-Sanctions and Beyond*, Westview Press, Oxford, 1997, hal 127

<sup>4</sup> Charles Tripp, *A History Of Iraq*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 242

<sup>5</sup> Ibid, hal. 242

segala cara dan kekuatannya untuk menekan mereka<sup>6</sup>. Disamping itu Presiden Saddam Hussein berpandangan bahwa sebelum kedatangan penjajah Inggris, Kuwait adalah bagian dari Propinsi Basrah di Irak Selatan. Oleh karena itu Presiden Saddam Hussein bersikeras untuk merebut kembali Kuwait dari tangan penguasa Kuwait Sheikh Al Sabah yang dianggapnya telah merampas hak rakyat Irak. Presiden Irak Saddam Hussein dengan Partai Baathnya juga berambisi untuk menjadi Pemimpin bangsa Arab. Oleh karena itu Presiden Saddam Hussein berupaya melebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah baik secara politik, ekonomi maupun militer.

Kegagalan memperoleh dukungan ekonomi dari negara-negara Teluk dan keyakinan Presiden Saddam Hussein bahwa Amerika Serikat tidak akan membantu Kuwait, maka Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait yang hanya di selesaikan dalam 24 jam<sup>7</sup>. Irak mengerahkan lebih dari 100.000 tentara dan hampir 2.000 tank untuk menduduki Kuwait<sup>8</sup>. Penguasa Kuwait, Shaikh Jabir Al-Sabah dan semua keluarganya berhasil mengungsi ke Arab Saudi yang kemudian disusul oleh lebih kurang 300.000 warga negara Kuwait. Sementara itu Irak membentuk Pemerintahan Daerah Provinsi Kuwait dengan alasan bahwa tentara Irak diundang oleh rakyat Kuwait untuk mempertahankan revolusi yang menentang Penguasa Keluarga Al-Sabah. Beberapa hari setelah invasi, Pemerintah Irak mengumumkan bahwa Irak telah menganeksasi Kuwait dan kembali menjadi wilayah Irak<sup>9</sup>. Pada pertengahan Agustus 1990, Pemerintah Irak menegaskan bahwa Kuwait telah menjadi Provinsi ke-19 Irak. Aneksasi Irak terhadap Kuwait menurut Presiden Saddam Hussein merupakan puncak pencapaian Tujuan dan Kepentingan Nasional Irak dalam “meluruskan” sejarah yang keliru oleh penjajah Inggris yang memisahkan Kuwait dari Negara Irak. Pemerintah Irak sangat mengharapkan tindakan aneksasinya didukung oleh negara-negara Teluk, namun kenyataannya tidak ada satupun negara-negara Teluk yang mendukungnya dan bahkan semua negara di kawasan Timur Tengah justru mengecam dan mengutuknya, kecuali Yordania, Yaman dan Palestina.

Kecaman terhadap invasi Irak terhadap Kuwait tidak hanya datang dari dunia Arab, namun juga dari seluruh penjuru dunia. Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan di Timur Tengah dan merasa kepentingan nasionalnya terancam segera mengecam Irak dan meminta agar Irak segera mundur dari Kuwait. Demikian juga PBB

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 242

<sup>7</sup> Ibid, hal. 243

<sup>8</sup> Alastair Finlan, *Essential Histories, The Gulf War 1991*, Osprey Publishing, Oxford, hal. 26

<sup>9</sup> Tripp, opcit, hal. 243

sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional juga mengancam Irak dan meminta Irak segera meninggalkan Kuwait. Namun semua kecaman dan tuntutan dunia internasional ditanggapi dingin oleh Presiden Irak Saddam Hussein. Justru Presiden Saddam Hussein menegaskan, Irak akan mundur dari Kuwait, apabila Israel juga meninggalkan tanah Palestina. Penegasan Presiden Saddam Hussein ini justru membuat Amerika Serikat sangat marah. Arab Saudi yang merasa terancam oleh Irak, segera meminta bantuan militer Amerika Serikat. Demikian juga Pemerintah Kuwait yang berada di Arab Saudi meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait dan mengembalikan legitimasi kekuasaannya. Atas permintaan itu, Amerika Serikat segera mengirim dan membangun kekuatan militernya di Kawasan Teluk khususnya di Arab Saudi untuk menghadapi Irak. Penempatan kekuatan militer Amerika Serikat di Arab Saudi dikenal dengan sandi "Operasi Tameng Gurun" (*Operation Desert Shield*) dalam rangka melindungi Arab Saudi dari intervensi militer Irak.

Dewan Keamanan PBB yang bertanggungjawab atas keamanan dan perdamaian internasional berdasarkan Pasal 39 Bab VII Piagam PBB segera melaksanakan Sidang Darurat dan mengeluarkan Resolusi 660 Dewan Keamanan PBB pada tanggal 2 Agustus 1990 yang berisi kecaman terhadap invasi Irak terhadap Kuwait dan memerintahkan Irak mundur dari Kuwait. Menghadapi Resolusi 660 ini Pemerintah Irak tidak menanggapi dan justru makin memperkuat posisinya di Kuwait. Karena Pemerintah Irak tidak berniat mundur dan meninggalkan Kuwait, maka Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 41 Bab VII Piagam PBB pada tanggal 6 Agustus 1990 mengeluarkan Resolusi 661 yang berisi melaksanakan embargo ekonomi dan perdagangan kepada Irak kecuali untuk kepentingan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan makanan. Resolusi 661 itu juga berisi pembentukan Komisi Khusus Sanksi (*Special Sanctions Committee*) yang mengawasi pelaksanaan embargo<sup>10</sup>. Gerak cepat Dewan Keamanan PBB dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait ini tidak terlepas dari dorongan Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Pada tanggal 25 Agustus 1990 Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 42 Bab VII Piagam PBB mengeluarkan Resolusi 665 yang meminta semua negara anggota PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan agar embargo ekonomi dan perdagangan terhadap Irak dapat berjalan dan lebih efektif. Sedangkan Resolusi 666 Dewan Keamanan PBB yang

---

<sup>10</sup> Cordesman and Hashim, *opcit*, hal 138

dikeluarkan pada tanggal 13 September 1990 memberikan hak kepada Komisi Khusus Sanksi untuk melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan bantuan kemanusiaan dan bantuan makanan bagi rakyat Irak yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional maupun Organisasi Bantuan Kemanusiaan lainnya. Karena Irak tetap tidak bergeming atas resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan, maka pada tanggal 29 Nopember 1990 Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal 43 dan 44 Bab VII Piagam PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada Negara Anggotanya untuk menggunakan segala cara (*to use all necessary means*) agar Irak dikeluarkan dari Kuwait paling lambat pada tanggal 15 Januari 1991. Resolusi 678 juga menegaskan apabila pada tanggal 15 Januari Irak tidak mau mundur dari Kuwait, maka hal itu merupakan pelanggaran nyata (*flagrant contempt*) terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Batas waktu penarikan mundur yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Irak diatur untuk memberikan kesempatan terakhir bagi Irak guna menarik seluruh pasukannya militernya dari Kuwait.<sup>11</sup> Disamping itu untuk memberikan cukup waktu bagi para perunding dan utusan PBB untuk melakukan diplomasi dengan Pemerintah Irak.

Tindakan PBB dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait merupakan implementasi dari tugas dan peranan PBB seperti yang tercantum dalam Piagam PBB. Bab I Piagam PBB menjelaskan bahwa Tujuan PBB diantaranya adalah untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif dalam upaya mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, melakukan upaya perdamaian yang berdasarkan keadilan dan hukum internasional serta menyelesaikan setiap situasi dan konflik internasional yang dapat melanggar perdamaian. Disamping itu Bab VII Piagam PBB mengamanatkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau melakukan agresi dan akan memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan apa yang perlu diambil dalam rangka memelihara atau mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional (Pasal 39). Dewan Keamanan PBB juga dapat menentukan tindakan-tindakan non militer seperti pemutusan hubungan ekonomi dan hubungan diplomatik (Pasal 41). Namun apabila tindakan-tindakan pemutusan hubungan ekonomi dan diplomatik masih belum memadai dan konflik masih terus berlangsung, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mengerahkan kekuatan militer baik darat, laut

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 138

maupun udara yang diperlukan untuk memelihara dan mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. Tindakan militer tersebut dapat meliputi demonstrasi, blokade dan operasi militer darat, laut dan udara oleh negara-negara anggota PBB (Pasal 42).

Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan militer dalam mengusir Irak dari Kuwait merupakan preseden bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB selanjutnya. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 678, untuk pertama kalinya setelah Perang Korea, memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengeluarkan Irak dari Kuwait. Sebelumnya, mandat penggunaan kekuatan militer hanya diberikan secara tidak langsung kepada Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk bertindak atas nama Pemerintah Korea Selatan untuk memukul mundur pasukan Korea Utara yang melancarkan invasi terhadap Korea Selatan<sup>12</sup>. Hal yang khusus dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 678 adalah untuk pertama kalinya Bab VII Piagam PBB digunakan dengan memberikan mandat penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi agresi militer untuk mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. Alasan utama tidak digunakannya Bab VII sebelumnya adalah terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet mengakibatkan setiap perdebatan di Dewan Keamanan PBB dalam penggunaan kekuatan militer selalu diakhiri dengan veto oleh salah satu pihak, karena mereka tidak menghendaki adanya intervensi militer terhadap negara yang berada dalam pengaruhnya<sup>13</sup>. Pada akhir tahun 1990, walaupun Uni Soviet masih berdiri, namun tanda-tanda mengarah keruntuhannya mulai nampak. Oleh karena itulah Dewan Keamanan PBB dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dapat menggunakan Bab VII Piagam PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap Irak. Resolusi pertama adalah pemberian sanksi ekonomi dan selanjutnya menggunakan kekuatan kolektif (*the Security Council could clearly invoke Chapter VII of the Charter to take enforcement measures against Irak, first mandatory economic sanctions and later the use of collective force*).<sup>14</sup> Dari tugas operasi perdamaian PBB yang meliputi *Peace Making* (menciptakan perdamaian), *Peace Building* (membangun perdamaian), *Peace Keeping* (memelihara perdamaian) dan *Peace Enforcement* (menegakan perdamaian dengan menggunakan kekuatan militer), sebagian besar

---

<sup>12</sup> Payne, opcit, hal.1

<sup>13</sup> Ibid, hal.2

<sup>14</sup> Liu, opcit, hal 29

anggota Dewan Keamanan PBB sepakat untuk menggunakan *Peace Enforcement* dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

Dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait ini, Bab VII Piagam PBB tidak sepenuhnya dilaksanakan, karena Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat tidak dibawah komando Dewan Keamanan PBB. Bab VII Piagam PBB menyatakan bahwa Pasukan PBB harus berada dibawah komando Dewan Keamanan PBB dan Komite Staf Militer PBB. Namun kenyataan di lapangan pemegang komando seluruh Pasukan Koalisi adalah Amerika Serikat dibawah pimpinan Jenderal H. Norman Swarzkofit atas dasar mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Disamping itu Pasukan Koalisi juga tidak menggunakan atribut sebagai Pasukan PBB seperti peralatan tempur yang tidak diberi warna putih dengan lambang PBB, tidak menggunakan Helmet atau Baret PBB yang berwarna biru atau atribut PBB lainnya yang seharusnya digunakan pada setiap operasi perdamaian PBB.

Amerika Serikat telah menunjukkan kemampuannya untuk memobilisasi kekuatan militer yang sangat besar dan menanggung biaya bagi pasukan militer yang dikerahkannya. Operasi militer mengusir Irak dari Kuwait membutuhkan pasukan militer, persenjataan dan perbekalan yang sangat besar dan hanya negara-negara kuat dan mampu saja yang dapat mendukung operasi militer sebesar itu. Dengan telah dibangunnya kekuatan militer yang besar itu oleh Amerika Serikat, tidak ada pilihan lagi bagi PBB kecuali melakukan kerjasama dengan memberikan mandat kepada Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Mandat Dewan Keamanan PBB kepada Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat menunjukkan kelemahan organisasi dan sistem PBB. Organisasi PBB tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan dan mengerahkan pasukan militer dalam jumlah yang besar dan terlatih untuk memenuhi kepentingan dan tujuan PBB, sehingga PBB dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait itu mau tidak mau harus melakukan kerjasama dan saling ketergantungan dengan Amerika Serikat untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Disamping itu juga Amerika Serikat tidak menghendaki pasukan militernya dibawah komando PBB. Oleh karena itulah diperlukan adanya peraturan dan ketentuan PBB yang mengatur tentang rantai komando yang jelas dan standar kualitas pasukan

militer yang dibutuhkan PBB agar dapat menjalankan tugas bersamanya dengan baik dan terkendali<sup>15</sup>.

Sementara proses resolusi konflik dilakukan oleh PBB, Amerika Serikat secara bertahap membangun kekuatan militernya di Kawasan Teluk dan membangun Pasukan Koalisi dari berbagai negara. Secara cepat Amerika mampu menggalang kekuatan militer dari negara-negara anggota PBB yang mendukung resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Ada 34 negara yang mendukung Pasukan Koalisi diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, Italia, Spanyol, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Argentina, Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Pakistan, Bangladesh dan Siria<sup>16</sup>. Disamping itu pada tanggal 10 Januari 1991 Kongres Amerika Serikat memberikan kekuasaan kepada Presiden AS George W. Bush (Senior) untuk melancarkan operasi militer untuk mengeluarkan Irak dari Kuwait<sup>17</sup>. Akhirnya hingga batas akhir yang ditentukan oleh Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB yaitu tanggal 15 Januari 1991 tengah malam dan Irak tidak juga menarik mundur kekuatan militernya dari Kuwait, maka pada tanggal 17 Januari 1991 Jam 03.00 pagi hari waktu Irak Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan Operasi Badai Gurun (*Operation Desert Storm*) yang dimulai dengan serangan udara besar-besaran terhadap instalasi-instalasi militer Irak.

Operasi Badai Gurun dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama dengan melancarkan serangan udara terhadap target-target militer penting dan tahap kedua adalah operasi darat gabungan untuk mengusir Irak dari Kuwait. Pasukan Koalisi dibawah pimpinan Jenderal H. Norman Schwarzkoff melancarkan serangan udara dengan mengerahkan pesawat-pesawat udara yang membawa bom-bom untuk menghancurkan instalasi militer Irak. Selama Operasi Badai Gurun Pasukan Koalisi telah menjatuhkan bom lebih dari 90.000 Ton dan hampir 110.000 sorti serangan udara. Serangan udara Pasukan Koalisi ini dapat menghancurkan jaringan komando militer dan melumpuhkan kekuatan militer Irak, juga menjatuhkan 34 pesawat tempur dan menghancurkan 100 pesawat tempur Irak di pangkalannya.<sup>18</sup> Pada operasi udara ini, Angkatan Laut AS menggunakan juga Rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal-kapal atas air dan kapal selam Angkatan Laut AS. Rudal Tomahawk merupakan rudal

---

<sup>15</sup> Payne, opcit, hal.2

<sup>16</sup> John Simpson, *The Wars Against Saddam – Taking the Hard Road to Baghdad*, Pan MacMillan, London, 2003, hal. 170

<sup>17</sup> Dilip Hiro, *Iraq-In the Eye of the Storm*, Thunder's Mouth Press, New York, 2002, hal.3

<sup>18</sup> Finlan, opcit, hal. 37

dengan presisi yang sangat tinggi dan mampu menghancurkan sasaran-sasaran darat militer Irak jauh dibalik horizon. Setelah berhasil melancarkan operasi udara dengan baik dan sesuai rencana, maka pada tanggal 24 Februari 1991 Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan operasi darat gabungan dan dapat mengusir Irak dari Kuwait. Pada tanggal 27 Februari 1991 operasi pembebasan Kuwait dinyatakan selesai dan gencatan senjata diberlakukan<sup>19</sup>.

Dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait ini, yang cukup mengherankan adalah keberanian Presiden Irak Saddam Hussein untuk menginvasi Kuwait. Padahal dia mengetahui bahwa dalam situasi internasional yang relatif aman dan damai, invasi Irak terhadap Kuwait akan mendapatkan protes dan kecaman keras dari dunia internasional. PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional dan Amerika Serikat yang merasa kepentingan nasionalnya terancam akan menentang keras dan mengambil tindakan tegas terhadap Irak. Hal-hal yang melatarbelakangi invasi Irak terhadap Kuwait itulah yang memerlukan penelitian mendalam yang mencakup latar belakang sejarah Irak, kepentingan nasional Irak, situasi dalam negeri Irak pada saat itu dan ambisi Presiden Irak Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin Dunia Arab. Disisi lain Amerika Serikat yang telah mengetahui adanya persiapan-persiapan militer Irak di perbatasan Irak-Kuwait, tidak melakukan upaya pencegahan dan justru terlihat membiarkan Irak untuk menyerbu Kuwait. Hal inilah yang membuat penelitian lebih menarik lagi untuk mengetahui latar belakang mengapa Amerika Serikat membiarkan Irak menyerbu Kuwait, apa sebenarnya agenda dan strategi raya Amerika Serikat dibalik kasus invasi Irak terhadap Kuwait itu. Sementara itu, PBB sebagai badan internasional yang bertanggung jawab terhadap keamanan internasional juga merasa perlu bertindak karena ada unsur ancaman terhadap perdamaian internasional.

Dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, upaya yang dilakukan oleh PBB merupakan kasus yang cukup menarik, karena tindakan Irak merupakan tantangan bagi keberadaan dan kredibilitas PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab atas keamanan dan perdamaian internasional. Disamping itu Amerika Serikat yang merasa kepentingan nasionalnya di Timur Tengah terancam dengan cepat merespon permintaan Arab Saudi dan Kuwait untuk memberikan bantuan militer dalam menghadapi agresi Irak dengan melaksanakan Operasi Tirai Gurun (*Operation Desert Shield*). Oleh karena itulah PBB dan Amerika Serikat harus

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 46

bekerjasama untuk mengusir Irak dari Kuwait sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kajian tentang upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait tahun 1990-1991 ini lebih menarik ketimbang kasus penyerbuan Amerika Serikat terhadap Afganistan dan Irak pada tahun 2002 dan 2003, karena pada tahun 1990 Uni Soviet sebagai negara adikuasa masih ada walaupun mendekati keruntuhannya. Pada saat itu apabila Amerika Serikat melakukan intervensi militer untuk mengusir Irak dari Kuwait tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, dikhawatirkan Uni Soviet dengan segala kekuatan yang dimilikinya akan membantu Irak yang dapat mengakibatkan perang antar negara adikuasa bahkan menjurus kepada Perang Dunia. Oleh karena itulah penelitian tentang upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait tahun 1990-1991 merupakan hal yang menarik untuk diungkapkan.

Tindakan kolektif yang dilakukan oleh Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat dan disponsori oleh PBB terhadap Irak merupakan perwujudan dari tindakan keamanan kolektif (*collective security*) dalam upaya memelihara dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Dalam hal ini sesuai dengan teori keamanan kolektif bahwa apabila ada sebuah negara anggota organisasi keamanan kolektif melakukan agresi terhadap anggota lainnya, maka seluruh anggota organisasi itu berkewajiban untuk membantu negara yang diserang dan bersama-sama memulihkan keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Itulah sebabnya ketika Irak melakukan invasi militer terhadap Kuwait, sebagian besar anggota PBB mengecamnya dan bersama-sama meminta agar Irak mundur dari Kuwait. Karena Irak tidak mau mundur, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 dan Amerika Serikat menggalang kekuatan koalisi untuk mengusir Irak dari Kuwait. Tindakan kolektif yang disponsori oleh PBB dan dilakukan oleh Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat merupakan tindakan penegakan untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional dengan menggunakan kekuatan militer (*Peace Enforcement*) sesuai dengan tujuan dan Piagam PBB.

*Peace enforcement* yang dilakukan PBB terhadap Irak merupakan kelanjutan dari kegagalan diplomasi yang dilakukan PBB maupun negara-negara anggota PBB. Resolusi 660, 661, 665 dan 666 Dewan Keamanan PBB pada hakekatnya adalah suatu upaya dari PBB dan dunia internasional agar penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait dilaksanakan dengan cara-cara damai dan diplomasi. Utusan PBB maupun perunding dari Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya berupaya mempengaruhi Presiden Irak Saddam Hussein agar menarik mundur pasukannya dan

keluar dari Kuwait tanpa syarat. Namun segala upaya diplomasi yang dilakukan mengalami jalan buntu dan Pemerintah Irak tetap tidak begeming. Upaya diplomasi terakhir yang dilakukan PBB adalah dengan mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan ruang waktu yang terakhir kalinya bagi upaya diplomasi oleh utusan PBB untuk meyakinkan Pemerintah Irak untuk menarik pasukannya dari Kuwait. Namun upaya itupun gagal dan sesuai batas waktu yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, maka *peace enforcement* dilakukan Dewan Keamanan PBB dengan memberikan mandat kepada Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk melancarkan operasi militer dengan sandi "Operasi Badai Gurun" dan berhasil mengusir Irak dari Kuwait, mengembalikan legitimasi Pemerintahan Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Dalam upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, ada dua pandangan yang berbeda tentang adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Pandangan pertama menyatakan bahwa PBB hanyalah dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan kepentingan dan strategi global Amerika Serikat. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa PBB dan Amerika Serikat adalah mitra dalam yang upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait sesuai dengan kepentingan bersama. Pandangan pertama seperti yang ditulis oleh Al-Ahram Weekly Edisi 693 Tahun 2004 dalam tajuknya yang berjudul "*Who's Using Who*", menyatakan bahwa Amerika Serikat memperlakukan dan memandang PBB seperti halnya sepasang sepatu bekas yang dapat dipakai atau dilepas sesuai dengan kebutuhannya<sup>20</sup>. Al-Ahram juga melihat bahwa perlakuan Amerika Serikat terhadap PBB tidak lebih hanya sebagai pemanis saja dan menganggap PBB tidak lebih dari sebuah instrumen bagi kepentingan dan strategi global Amerika Serikat. Dalam penyelesaian kasus Invasi Irak terhadap Kuwait, Amerika Serikat menggunakan PBB untuk memenuhi kepentingan dan strategi globalnya. Amerika Serikat mendorong dan memaksa agar Dewan Keamanan PBB bertindak sesuai dengan keinginannya. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan produk pemaksaan Amerika Serikat terhadap PBB, sehingga Amerika Serikat dapat mengambil tindakan militer terhadap Irak sesuai dengan kepentingan dan strategi globalnya.

Pandangan yang mengakui adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat adalah Laporan National Committee on American Foreign Policy yang berjudul "*UN-US*

---

<sup>20</sup> Al-Ahram Weekly, "*Who's Using Who*", hal. 1

*Relation 2007: The Role of The United States in The UN*". Laporan itu menegaskan bahwa kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat semakin baik dan kearah yang lebih positif. Dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990, PBB dan Amerika Serikat sebagai mitra telah melakukan kerjasama yang saling ketergantungan dengan melahirkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan mandat penggunaan kekuatan militer kepada Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait. Kerjasama itu ditunjukkan dengan keberhasilan PBB dan Amerika Serikat mengusir Irak dari Kuwait dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut.

Dengan adanya dua pandangan yang berbeda tersebut diatas, tesis ini mencoba menggali data-data dan fakta-fakta yang ada dari berbagai sumber dan literatur untuk menganalisis bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Analisis yang dilakukan juga mencakup tujuan PBB seperti yang tercantum dalam Piagam PBB dan upaya PBB serta kepentingan dan upaya Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dalam menghadapi kasus itu, PBB ingin menunjukkan eksistensi, kredibilitas dan kapabilitasnya sebagai organisasi internasional yang dapat dipercaya. Di lain pihak Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang mampu melakukan tindakan apapun untuk menghukum negara-negara yang tidak patuh terhadap hukum internasional. Dalam hal ini akan nampak adanya tindakan dua aktor yang saling memanfaatkan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam rangka menyelesaikan sebuah kasus yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

## **B. Perumusan Masalah**

Invasi Irak terhadap Kuwait merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota PBB. Agresi militer yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain disamping merupakan tindakan anarkis yang ditentang oleh dunia internasional, juga merupakan pelanggaran terhadap Bab I Piagam PBB yang menjelaskan bahwa Tujuan PBB diantaranya adalah memelihara keamanan dan perdamaian internasional, mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif dalam upaya mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, melakukan upaya perdamaian yang berdasarkan keadilan dan hukum internasional

serta menyelesaikan setiap situasi dan konflik internasional yang dapat melanggar perdamaian. Disamping itu Bab VII Piagam PBB menjelaskan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan eksistensi setiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau melakukan agresi dan akan memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan apa yang perlu diambil dalam rangka memelihara atau mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional (Pasal 39). Disini jelas bahwa PBB berkewajiban untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Amerika Serikat yang merasa kepentingan nasionalnya di Timur Tengah terancam dan atas dasar permintaan Arab Saudi dan Kuwait segera mengirim dan membangun kekuatan militernya di Kawasan Teluk. Pemerintah Amerika Serikat juga mendapat kekuasaan dan otorisasi dari Kongres Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militernya dalam mengusir Irak dari Kuwait. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat merasa percaya diri untuk menggelar kekuatan militernya dan membangun koalisi internasional untuk mengusir Irak dari Kuwait, menjaga kepentingan nasionalnya dan mengembalikan legitimasi Pemerintahan Kuwait di negaranya.

PBB yang bertanggungjawab atas keamanan dan perdamaian internasional melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan merupakan bukti tanggungjawab PBB atas tugas dan tujuannya. Namun untuk mengusir Irak dari Kuwait, PBB tidak memiliki kekuatan militer yang berada dibawah komandonya. PBB hanya dapat mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait, Di pihak lain Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang besar, kuat, profesional dan modern serta mempunyai kepentingan untuk mengusir Irak dari Kuwait, namun Amerika Serikat tidak memiliki mandat untuk melancarkan operasi militer. Agar upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait dapat dilaksanakan, maka Dewan Keamanan PBB bersama-sama dengan Amerika Serikat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itulah dalam kasus ini terlihat adanya kerjasama dan interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat, yaitu PBB memerlukan Amerika Serikat untuk mengeluarkan dan mengimplementasikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat membutuhkan PBB untuk memberikan mandat penggunaan kekuatan militer dalam rangka menyelesaikan invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka memulihkan keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian pertanyaan

pokok dari penelitian ini adalah ***“Bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus Invasi Irak terhadap Kuwait ?***

### **C. Signifikansi Penelitian**

1. Mengungkap terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dengan menggunakan tiga kerangka teori sebagai pisau analisis, yaitu teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi, penelitian ini akan membahas dan menganalisis terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.
2. Hasil-hasil penelitian ataupun buku-buku referensi yang ada saat ini khususnya yang menggambarkan dan menelaah peranan PBB dan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait Tahun 1990-1991 hanya menggunakan salah satu teori yang ada dan cenderung menyangkut masalah strategi, operasional dan teknik peperangan. Oleh karena itu pengkajian dengan menggunakan beberapa teori sekaligus merupakan hal yang baru.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah, pandangan dan referensi tentang hasil kajian mengenai kerjasama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait yang saat ini masih langka.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan bahwa interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dapat dijadikan sebuah preseden ataupun yurisprudensi bagi penyelesaian konflik internasional di masa mendatang.
5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan teori dan praktek Ilmu Hubungan Internasional.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang latar belakang terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait serta tindakan invasi Irak dan situasi pasca invasi Irak yang mendorong dilakukannya upaya penyelesaian kasus invasi Irak yang dilakukan oleh PBB maupun Amerika Serikat.
2. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang reaksi dan upaya internasional, penjelasan tentang Piagam PBB dan upaya perdamaian PBB dalam menyelesaikan kasus Invasi Irak terhadap Kuwait yang menunjukkan adanya ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat dan perlunya kerjasama PBB-Amerika Serikat.
3. Untuk menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah, latar belakang dan upaya Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait yang menunjukkan adanya ketergantungan Amerika Serikat terhadap PBB dan perlunya Kerjasama PBB-Amerika Serikat.
4. Untuk memberikan gambaran tentang hasil analisis proses terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait yang dapat mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

#### **E. Kerangka Teori**

Tesis ini ditulis dengan menggunakan kerangka Teori Interdependensi, Teori Keamanan Kolektif dan Teori Kolaborasi. Ketiga teori ini diharapkan dapat memotret dan menganalisis proses terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait, sehingga dapat diperoleh hal-hal menarik yang tidak terungkap sebelumnya.

## 1. Teori Interdependensi

Apabila sebuah negara bekerjasama dan tergantung kepada negara lain, berarti terjadi dependensi negara tersebut kepada negara lain. Namun apabila dua negara atau lebih secara simultan tergantung satu sama lain, maka terjadi interdependensi diantara negara-negara itu. Interdependensi merupakan fenomena politik dan bukan hanya fenomena ekonomi. Negara-negara akan saling ketergantungan di bidang ekonomi dikarenakan adanya hubungan dan kerjasama di bidang politik. Saling ketergantungan antar dua negara atau lebih tidak berarti tingkat ketergantungannya sama dan simetris. Seringkali sebuah negara lebih tergantung daripada negara lain. Tingkat ketergantungan sebuah negara pada jangka pendek terhadap negara lain akan berbeda dengan ketergantungan jangka panjang.

Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul *“Power and Interdependence-World Politics in Transition”* menyatakan bahwa asumsi awal dalam era interdependensi pada hubungan internasional adalah perubahan, sehingga dunia akan menjadi lebih interdependen dalam bidang ekonomi, komunikasi dan aspirasi manusia. Aktor utama pada era ini adalah aktor non-teritorial seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional dan gerakan sosial transnasional.<sup>21</sup> Pandangan Keohane dan Nye tentang interdependensi berdasarkan asumsi tersebut, sehingga mereka mendefinisikan interdependensi adalah sebuah situasi saling ketergantungan dimana kehilangan otonomi menimbulkan efek timbal balik yang berharga, sehingga interdependensi tidak hanya mengacu kepada situasi yang saling menguntungkan<sup>22</sup>. Sejak berakhirnya perang, analisis tentang politik interdependensi terasa sangat kurang, dan penjelasan tradisional tentang perubahan menjadi tanda tanya. Keohane dan Nye membangun sebuah kerangka teori koheren yang dapat menjelaskan kontinuitas dan perubahan dalam politik internasional untuk menunjukkan realitas interdependensi dalam politik internasional kontemporer. Pada intinya Keohane dan Nye mendefinisikan interdependensi berdasarkan

---

<sup>21</sup> Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence- World Politics in Transition*, Little, Brown Company Inc, Boston, 1977, hal. 24

<sup>22</sup> Ibid, hal. 24-25

kepada tiga karakteristik, yaitu : 1) aktor adalah negara dan aktor non-negara dengan berbagai saluran komunikasi, antar negara, lintas negara dan transnasional; 2) agenda hubungan antar negara terdiri dari berbagai isu yang tidak diatur oleh sebuah herarki yang jelas dan konsisten; 3) kekuatan militer memainkan peranan yang relatif kecil dalam hubungan internasional. Sebagai hasil dari ketiga karakteristik tersebut proses pembedaan politik menimbulkan perubahan sumber kekuatan menjadi kekuatan sebagai pengendali hasil dari keterkaitan strategis, penyusunan agenda, hubungan transnasional dan antar negara.<sup>23</sup>

Keohane dan Nye tidak mengatakan bahwa kekuatan militer adalah tidak signifikan, hanya mereka berpandangan bahwa tindakan militer sangat mahal dan biayanya akan terus meningkat dengan berbagai alasan. Contohnya, senjata nuklir akan meningkatkan biaya yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Disamping itu penggunaan kekuatan militer dalam masalah tertentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa penggunaan kekuatan militer akan lebih efektif daripada penggunaan kekuatan ekonomi dalam mencapai sasaran tertentu. Keohane dan Nye juga menekankan bahwa aktor transnasional akan memilih sasaran sendiri ketimbang ditentukan oleh negara. Konsekuensinya adalah bahwa organisasi internasional akan memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan agenda keamanan yang juga merupakan suara dan keinginan dari negara-negara yang lebih kecil<sup>24</sup>.

Berkaitan dengan kekuatan (*power*) dalam interdependensi, Keohane dan Nye membedakan dua dimensi dari interdependensi, yaitu sensitifitas (*sensitivity*) dan kerawanan (*vulnerability*). Sensitifitas berkaitan dengan seberapa besar sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan negara lain sebelum bereaksi atas terjadinya perubahan, dengan asumsi bahwa kerangka kerjasama tidak mengalami perubahan. Sedangkan kerawanan adalah sebagaimana baik dan cepatnya sebuah negara dapat bereaksi atas terjadinya perubahan kebijakan negara lain, dengan asumsi kerangka kerjasama telah berubah. Keohane dan Nye menyimpulkan bahwa dilihat dari sudut pandang penyediaan

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 12

<sup>24</sup> Huseyn Isiksal, *To What Extend Complex Interdependence Theories Challenge to Structural Realist School of International Relations ?*, Alternatives-Turkish Journal of International Relations, Vo.3/2&3, Summer&Fall 2004, hal.140

sumber kekuatan (*providing power resources*) bagi aktor, maka sensitifitas dari interdependensi tidak sepenting kerawanan dalam interdependensi.<sup>25</sup>

Interdependensi menentukan institusi internasional sebagai cara untuk mencapai sasaran, karena rejim dan institusi internasional akan menimbulkan kerjasama dan hal itu membuat negara akan lebih penting dari kekuatan anarki dalam sistem internasional. Selanjutnya Keohane dan Nye berpendapat bahwa institusi yang kuat dan norma yang kuat dapat memainkan peranan domestik maupun internasional. Asumsi itu sangat mungkin karena aktor non-pemerintah dan jaringan adalah cukup efektif dalam melakukan penetrasi terhadap negara tanpa memperdulikan batas negara dan menggunakan aktor domestik untuk mempengaruhi pemimpin politik dalam memenuhi keinginan mereka.

Konsep interdependensi selalu didiskusikan oleh para pendukung paradigma teori hubungan internasional, baik oleh kaum pluralis atau liberalis, realis maupun globalis. Interdependensi merupakan pandangan dari kaum pluralis atau liberalis, perimbangan kekuatan (*balance of power*) adalah pandangan kaum realis dan dependensi merupakan pandangan kaum globalis. Pandangan tentang interdependensi internasional bukanlah hal yang baru dan dasar pemikirannya adalah bahwa dua atau lebih aktor saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Beberapa tahun terakhir ini teori tentang interdependensi telah mengalami perkembangan kepada hal yang lebih analitik dan konseptual dan berguna untuk perkembangan teori hubungan internasional. Kaum pluralis berpendapat bahwa interdependensi memberikan pegangan yang lebih akurat dalam kondisi politik internasional dewasa ini ketimbang konsep perimbangan kekuatan.<sup>26</sup> Kaum realis cenderung untuk melihat interdependensi sebagai kerawanan sebuah negara terhadap negara lain, sehingga interdependensi harus dihindari atau paling tidak dikurangi. Berbeda dengan kaum pluralis yang berpandangan bahwa interdependensi melibatkan "pengaruh timbal balik diantara negara-negara atau aktor-aktor dari berbagai negara", sehingga tidak mempertimbangkan interdependensi sebagai kerawanan tapi lebih kepada multi koneksi yang menghubungkan masyarakat termasuk antar negara, antar pemerintahan dan hubungan transnasional.

---

<sup>25</sup> Keohane and Nye, *opcit*, hal. 12

<sup>26</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, 3<sup>rd</sup> Edition, Allyn and Balcon, Boston, 1999, hal.215

Interdependensi memiliki implikasi dan terhadap pandangan hubungan internasional. Interdependensi paling tidak merupakan kesempatan untuk membangun hubungan baik antar aktor yang terlibat, terutama dalam bidang perdagangan, keuangan, komunikasi, polusi lingkungan atau transfer teknologi. Mengelola hubungan interdependensi akan melibatkan pembuatan rejim internasional (*international regime*) yang mencakup peraturan-peraturan, prosedur dan lembaga-lembaga yang diperlukan atau organisasi internasional untuk menyelesaikan isu atau kasus yang dihadapi bersama. Dalam hubungan internasional yang tidak mempunyai lembaga otoritas tertinggi, maka peraturan-peraturan yang dibutuhkan dibuat oleh negara-negara secara sukarela agar diperoleh tingkat ketertiban tertentu dalam hubungan internasional.

Rejim internasional akan membantu menyediakan kerangka politik didalam proses perekonomian internasional. Ada empat penjelasan tentang perubahan rejim yang diperlukan, yaitu proses ekonomi, struktur kekuatan yang utuh, struktur kekuatan pada area tertentu dan model organisasi internasional. Proses ekonomi, perubahan dan kemajuan teknologi dan perkembangan interdependensi ekonomi akan membuat rejim internasional yang ada akan menjadi usang. Struktur kekuatan yang utuh, distribusi kekuatan militer menentukan struktur kekuatan dan negara yang memiliki kekuatan militer besar akan membuat peraturan. Apabila kekuatan militer sebuah negara berubah, maka peraturan yang telah dibuatnya akan berubah pula. Struktur kekuatan pada area tertentu, negara yang paling kuat dalam suatu area tertentu akan mendikte peraturan pada area itu. Model organisasi internasional, organisasi internasional mengacu kepada keterkaitan multilevel, norma dan lembaga. Oleh karena organisasi internasional sulit untuk dirubah, bahkan oleh negara adikuasa sekalipun. Organisasi internasional juga memberikan kapabilitas dependen secara organisatoris seperti Hak Suara, kemampuan membentuk koalisi dan mengendalikan jaringan elit. Secara umum penjelasan ini terpusat pada proses politik. Model ini mengasumsikan bahwa semua aktor yang terlibat tidak akan menghancurkan rejim internasional yang dibangun dengan mengeksploitasi kerawanan interdependensi yang lain.

Apabila negara atau aktor akan lebih interdependensi, maka kekuatan akan menjadi lebih penting dalam hubungan internasional. Intensitas keterkaitan antara negara atau aktor akan melipatgandakan berbagai isu yang ditimbulkan

oleh interdependensi yang dilakukan dan kesempatan yang diperoleh untuk mencapai hasil yang dikendaki. Hal itu disebabkan oleh kekuatan yang bekerja pada dimensi yang multikompleks dalam dunia internasional yang interdependensi, mengakibatkan sebuah kekuatan seperti kekuatan militer akan dirasakan akan berkurang nilai pentingnya dibandingkan dengan penggunaan cara-cara lain seperti diplomasi, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Namun secara umum pentingnya kekuatan internasional dalam semua dimensi akan terus meningkat seiring dengan interdependensi dunia internasional.<sup>27</sup>

Penerapan teori interdependensi ini terlihat dalam proses penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait yang dilakukan oleh PBB maupun Amerika Serikat. PBB dalam hal ini Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengeluarkan resolusi-rsolusinya tanpa dukungan Amerika Serikat. Demikian juga Amerika Serikat tidak serta merta dapat melakukan tindakan terhadap Irak tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB. Disinilah terlihat adanya interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

## **2. Teori Keamanan Kolektif (*Collective Security*).**

Keamanan kolektif merupakan sistem kerjasama keamanan yang melihat kedalam untuk menjamin terjaga dan terpeliharanya keamanan dalam sebuah kelompok negara-negara berdaulat. Organisasi keamanan kolektif modern yang pertama adalah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dibentuk setelah Perang Dunia I. Setiap negara anggota bertanggungjawab untuk melindungi negara anggota lainnya dari ancaman dan agresi negara lain. Dasar pemikiran keamanan kolektif ini adalah menentang setiap agresi yang dilakukan oleh sebuah negara atau kelompok negara anggota, bila perlu dengan menggunakan kekuatan militer oleh negara-negara anggota LBB yang lain. Sistem keamanan kolektif yang diterapkan oleh LBB tidak dapat berjalan baik, karena pada saat itu paham komunisme, fasisme dan liberalisme yang dianut oleh masing-masing negara anggota LBB belum memiliki kesamaan pandangan tentang keamanan kolektif. Namun setelah Perang Dingin, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merumuskan

---

<sup>27</sup> Joshua S.Goldstein, *International Relations*, 5<sup>th</sup> Edition, American University, Pearson Education, Delhi, 2003, hal. 319

dan memperbaharui sistem keamanan kolektif yang digunakan oleh LBB. Pasal 41 dan 42 Piagam PBB membolehkan negara-negara anggota PBB untuk melakukan tindakan untuk memelihara dan memulihkan keamanan dan perdamaian dunia.<sup>28</sup>

Konsep dasar keamanan kolektif adalah melembagakan kerjasama yang telah terjalin sehingga seluruh komunitas internasional sepakat untuk menentang terjadinya agresi oleh sesama negara anggota. Tidak ada satu negarapun yang akan membantu sebuah negara anggota yang akan melakukan agresi terhadap negara anggota lainnya, sehingga diharapkan keinginan untuk melaksanakan agresi dapat dicegah. Kondisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan keamanan kolektif adalah : *pertama*, semua negara anggota harus mengakui *status quo* dan menghentikan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan lain selain untuk pertahanan negaranya sendiri; *kedua*, semua negara anggota harus menyetujui untuk menentang setiap agresi yang terjadi; *ketiga*, semua negara terutama negara-negara besar harus memiliki komitmen yang kuat bahwa penggunaan kekuatan militer dan keuangannya tidak digunakan untuk membantu, mendorong atau melakukan agresi walaupun hal itu berkaitan langsung terhadap kepentingan nasionalnya; *keempat*, semua negara harus secara aktif mencegah tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama<sup>29</sup>.

Keamanan kolektif yang merupakan sebuah pandangan tua itu hingga saat ini masih terus dianut dan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pada abad ke-20 keamanan kolektif paling tidak telah mengalami tiga era perubahan, yaitu setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dingin. Arnold Wolfers dalam bukunya "*Discord and Collaboration*" menyatakan bahwa "Promosi sistem keamanan kolektif telah menciptakan situasi psikologis dimana Amerika Serikat tidak dapat mengembalikan kepada konsep awalnya, bukan karena keamanan kolektif telah dapat diwujudkan, namun karena jutaan umat manusia mempercayai bahwa keamanan kolektif dapat dilaksanakan. Keamanan kolektif telah menjadi simbol

---

<sup>28</sup> Robert Axelrod, *The Evolution of Cooperation*, Basic Books, New York, 1984, hal. 6

<sup>29</sup> Roland N. Stormberg, *Collective Security and American Foreign Policy: From the League of Nations to NATO*, 1963, hal. 3

utama dari sebuah harapan yang akan dibangun oleh semua bangsa-bangsa dimana perang tidak akan terjadi lagi”<sup>30</sup>.

Inis L. Claude dalam artikelnya yang berjudul “*Collective Security as an Approach to Peace*” menjelaskan bahwa keamanan kolektif dapat dipandang sebagai kompromi antara Pemerintahan Internasional dan perimbangan kekuatan (*Balance of Power*). Konsep perimbangan kekuatan dipandang sebagai sistem yang menghancurkan dan tidak cukup baik untuk memelihara keamanan dan perdamaian. Sedangkan pemerintahan internasional dianggap sebagai sesuatu hal yang utopis dan sulit untuk dicapai pada saat ini. Oleh karena itulah sistem keamanan kolektif dipandang sebagai jalan tengah dalam upaya memelihara dan menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Menurut Claude prasyarat agar keamanan kolektif dapat terlaksana adalah: *pertama*, setiap negara terutama negara-negara besar harus terlibat dalam organisasi keamanan kolektif dan menjamin untuk dapat dijalankan; *kedua*, tidak ada sebuah negarapun yang menolak proses pengambilan keputusan, dalam hal ini hak veto seperti yang berlaku di Dewan Keamanan PBB saat ini tidak boleh diberlakukan; *ketiga*, agar sanksi dapat dijalankan dengan baik, maka perekonomian internasional harus interdependensi sehingga pelaksanaan sanksi dapat dijalankan bersama-sama dan efektif; *keempat*, agar setiap negara yakin terhadap keamanan kolektif, maka mereka harus mengetahui dan yakin bahwa sistem keamanan kolektif dapat menjamin keamanan dan melindungi negara mereka.<sup>31</sup>

Dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, disini terlihat jelas bahwa Irak telah melanggar konsep dasar keamanan kolektif, yaitu dengan melakukan agresi militer terhadap sesama anggota PBB. Irak juga menggunakan kekuatan militernya tidak hanya untuk pertahanan negaranya, tapi juga untuk melakukan agresi terhadap negara lain. Oleh karena itulah komunitas internasional yang tergabung dalam PBB mengemukakan keras tindakan Irak dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai konsep dasar keamanan kolektif untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Demikian juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni

---

<sup>30</sup> Arnold Wolfers, *Discord and Collaboration*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2005, Hal. 197

<sup>31</sup> Inis L. Calude Jr, *Collective as an Approach to Peace from Classic Readings and Contemporary Debates in International Relations*, ed. Donald M. Goldstein, Phil Williams & Jay M. Shafritz, Thomson Wadsworth, Belmont CA, 2006, hal. 289

Soviet, Inggris, Perancis dan China mempunyai komitmen yang kuat untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai upaya yang dilakukan negara-negara besar tersebut untuk mengusir Irak dari Kuwait. Upaya keamanan kolektif ini dapat dilihat juga dengan deras dan kerasnya kecaman dan tekanan komunitas internasional agar Irak mundur dari Kuwait. Hal-hal itulah yang mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi-resolusinya dalam upaya memaksa Irak mundur dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional.

Amerika Serikat yang merupakan anggota PBB dan memiliki komitmen dan tanggungjawab atas terwujudnya keamanan kolektif yang telah disepakati bersama sesuai dengan Piagam PBB menggalang kekuatan internasional untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dalam hal ini Amerika Serikat mampu menggalang kekuatan militer Pasukan Koalisi yang pada akhirnya dapat melancarkan Operasi Badai Gurun dan dapat mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional yang didambakan bersama. Disinilah terlihat bahwa keamanan kolektif yang dibangun dalam kerangka PBB dapat berjalan baik dan efektif, apabila semua negara anggotanya memiliki kepatuhan dan komitmen yang kuat terhadap peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional.

### **3. Teori Kolaborasi**

Berbagai pengertian tentang kolaborasi telah sering dipublikasikan. Kamus Bahasa Inggris *Macquarie International* menjelaskan bahwa kolaborasi adalah tindakan kerjasama dengan seorang atau beberapa orang dalam upaya mencapai sesuatu tujuan<sup>32</sup>. Prinsip-prinsip kolaborasi mencerminkan adanya pertautan kemampuan dan keahlian. Sebagai kolaborator, mereka tidak hanya merencanakan, menentukan, melakukan, tapi juga berpikir bersama dengan mengkombinasikan konsep pemikiran-pemikiran yang independen hingga melahirkan sebuah kerangka kerjasama. Disamping itu kolaborasi mengharuskan juga adanya kontribusi yang seimbang atas sumberdaya, kekuatan dan kemampuan, sehingga tidak terjadi dominasi oleh salah satu

---

<sup>32</sup> Macquarie International English Dictionary, Bloomsbury Publishing, 2007

partisipan. Otorisasi untuk mengeluarkan keputusan ataupun tindakan yang akan dilakukan harus berada ditangan kelompok yang melakukan kolaborasi, dan hasil yang dicapai merupakan upaya bersama dari semua partisipan yang terlibat.

Kolaborasi mempunyai beberapa elemen yang terlihat dalam setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan, yaitu : *domain kolaborasi*, adalah komponen utama dan dinamis yang mewarnai proses kolaborasi; *partisipan kolaborasi*, adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam proses kolaborasi dan memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama; *media kolaborasi*, adalah media atau tempat dimana kolaborasi dilakukan; *insentif kolaborasi*, adalah sesuatu yang secara eksplisit ataupun implisit berorientasi kepada motivasi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kolaborasi, juga berkaitan dengan kepercayaan, tujuan bersama atau motif setiap partisipan; *kontribusi kolaborasi*, adalah kontribusi atau saham yang diberikan oleh setiap partisipan yang akan menimbulkan kesamaan pandangan dan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap hasil yang akan dicapai; *hasil kolaborasi*, adalah hal-hal yang ingin dicapai dan bias secara nyata terlihat, obyektif dan terbatas (seperti memenangkan perang) atau bisa juga hal-hal yang tidak nyata, subyektif dan berlanjut (seperti menumbuhkan dan memelihara persahabatan)<sup>33</sup>.

Di dalam proses kolaborasi terdapat tiga aspek utama yang memerlukan perhatian, yaitu : prasyarat agar kolaborasi dapat di laksanakan, proses kolaborasi dan hasil kolaborasi. Prasyarat kolaborasi mengacu kepada tiga pendekatan yang meliputi pendekatan kekuatan, pendekatan kepentingan dan pendekatan pengetahuan. Pendekatan pengetahuan menjelaskan bahwa konsensus tentang masalah yang dihadapi bersama sangat diperlukan dalam kerjasama internasional. Kesamaan pandangan oleh partisipan atas masalah-masalah yang dihadapi diperlukan untuk merespon dan mewujudkan kerjasama. Sedangkan pendekatan kekuatan dan kepentingan diarahkan agar semua partisipan yang terlibat dan kepentingan masing-masing partisipan harus dapat

---

<sup>33</sup> Mark Elliot, *General Theory of Collaboration*, UTC, 2006, hal. 4

menghasilkan keuntungan bersama yang maksimal dengan biaya yang lebih kecil.<sup>34</sup>

Pendekatan kekuatan menitikberatkan kepada konsep kekuatan sebagai penentu kerjasama. Walaupun banyak perbedaan pandangan dalam menafsirkan tentang pendekatan kekuatan, namun semuanya percaya bahwa distribusi kekuatan di dalam sistem internasional merupakan kunci keberhasilan suatu kerjasama. Kaum realis berpandangan bahwa negara senantiasa memusatkan perhatiannya kepada kekuatan dan keamanan, sehingga negara cenderung untuk konflik, kompetisi dan sering mengalami kegagalan untuk mencapai perdamaian dan bahkan ketika kepentingan bersama mengemuka. Sebagai konsekuensinya, agar kerjasama internasional dapat tercapai, maka harus ada sebuah negara yang dominan yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi keamanan dan perdamaian.<sup>35</sup>

Teori kolaborasi yang menggunakan pendekatan kepentingan adalah Teori Permainan. Teori permainan ini menjadi topik pembicaraan dalam teori hubungan internasional ketika mulai menurunnya hegemoni Amerika Serikat dan mulai tumbuhnya multipolarisme dalam hubungan internasional. Teori permainan ini mencoba untuk merumuskan tindakan kolektif yang dapat mendorong kerjasama. Ada tiga kunci utama untuk mencapai kerjasama. *Pertama*, mengidentifikasi kepentingan bersama, hal ini merupakan kunci utama yang melandasi sebuah kerjasama. Kepentingan bersama akan mengarahkan negara untuk melibatkan diri dalam sebuah kerjasama dengan negara lain yang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya. *Kedua*, komponen yang sangat penting dalam membangun sebuah kerjasama adalah "bayangan masa depan" (*shadow of the future*). Masa depan yang lebih baik akan menjadi dorongan bagi setiap negara untuk melakukan kerjasama jangka panjang. *Ketiga*, kunci utama untuk membangun kerjasama adalah jumlah negara yang terlibat. Banyaknya jumlah negara yang terlibat akan meningkatkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk kerjasama, sedangkan sedikitnya jumlah negara yang terlibat kerjasama akan meningkatkan mutu kerjasama yang dibangun.<sup>36</sup> Dalam konteks ini lebih

---

<sup>34</sup> Aurelia Micko, *Theory of Collaboration in Political Science: Application for Public-Private Partnership*, Research Paper, UNDP/Yale Collaborative Programme, Research Clinic, New Haven, 1999, hal.8

<sup>35</sup> Elliot, *opcit*, hal.4

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.6

sedikit negara yang terlibat dalam sebuah kerjasama akan lebih baik hasil yang akan dicapainya.

Berkaitan dengan kasus invasi Irak terhadap Kuwait, setiap tindakan dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diputuskan selalu melibatkan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki Hak Veto. Demikian juga dalam proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Invasi Irak terhadap Kuwait merupakan tindakan yang mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu minyak, Israel dan stabilitas kawasan. Oleh karena itulah Amerika Serikat mempunyai kepentingan untuk mengusir Irak dari Kuwait, agar kepentingan nasionalnya terjamin. Disisi lain PBB yang bertanggungjawab atas keamanan dan perdamaian dunia, sesuai Piagam PBB harus segera bertindak untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian yang terganggu oleh invasi Irak terhadap Kuwait.

Kesamaan pandangan PBB dengan Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait, sesuai teori kolaborasi merupakan salah satu faktor terjadinya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat. Demikian juga adanya kepentingan bersama antara PBB dan Amerika Serikat, yaitu mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, memungkinkan terbangunnya sebuah kolaborasi. Amerika Serikat mempunyai kepentingan nasional agar pasokan minyak untuk memenuhi kebutuhan energi strategisnya tidak terganggu, keamanan dan eksistensi Israel terjaga dan tidak menghendaki hegemoninya di kawasan Timur Tengah terganggu oleh ambisi Presiden Irak Saddam Husein untuk menjadi pemimpin Dunia Arab. Oleh karena itu upaya mengusir Irak dari Kuwait merupakan kaharusan bagi Amerika Serikat. Demikian juga PBB mempunyai kepentingan untuk mengusir Irak dari Kuwait agar dapat memulihkan keamanan dan perdamaian internasional khususnya di kawasan Timur Tengah sesuai dengan amanat Piagam PBB. Hal inilah yang mendorong PBB maupun Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam mengusir Irak dari Kuwait.

## F. Studi Pustaka

Studi Pustaka dalam penelitian ini dimulai dengan pandangan Al-Ahram Weekly Edisi 693 Tahun 2004 dalam tajuknya yang berjudul "*Who's Using Who*". Dalam tajuknya Al-Ahram menyatakan bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin, Irak telah menjadi ukuran tidak hanya bagi peranan PBB dalam tatanan dunia baru, namun juga bagi kredibilitas organisasi internasional dan kemampuannya untuk mengakhiri tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional. Ketika George W Bush (Senior) mulai memerintah, Amerika Serikat mulai memperlakukan PBB seperti halnya sepasang sepatu bekas yang dapat dipakai atau dilepas sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun demikian PBB tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam upaya penyelesaian kasus Irak.

Disamping situasi yang keras dan tidak menentu di Irak, Al-Ahram melihat bahwa perlakuan Amerika Serikat terhadap PBB tidak lebih hanya sebagai pemanis saja. Catatan perilaku Amerika Serikat memperlihatkan adanya kesan yang sangat sulit dihilangkan bahwa Amerika Serikat memandang PBB hanya sebagai sebuah instrumen bagi kepentingan dan strategi global Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak memandang PBB sebagai mitra dalam setiap proses dan upaya perdamaian dunia, tapi justru Pemerintahan Bush dengan kesadarannya menyatakan motto Amerika Serikat adalah : "*I am the World*" (Saya adalah Dunia) dan "*I am the UN*" (Saya adalah PBB), sehingga setiap perilaku dan tindakan Amerika Serikat adalah "*Law*" (Hukum) yang harus dipatuhi<sup>37</sup>.

Perilaku Amerika Serikat terhadap PBB dalam penyelesaian invasi Irak terhadap Kuwait merupakan desepsi Amerika Serikat atas kepentingan dan strategi globalnya di Timur Tengah. Desepsi Amerika Serikat tersebut nampak ketika Amerika Serikat menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan "*member states, cooperating with government of Kuwait, to use all necessary means to compel Iraq to unconditionally submit to UN resolutions before 15 Januari 1991*". Hal itu adalah kulminasi perang untuk membebaskan Kuwait. Karena Saddam Hussein gagal mengukur dan menganalisis transformasi besar yang terjadi dalam tata dunia baru sejak runtuhnya tembok Berlin setahun sebelumnya, tanpa disadarinya Saddam Hussein telah menyiapkan panggung yang sangat baik bagi Amerika Serikat untuk menunjukan impotensi Uni Soviet dan mempercepat keruntuhannya. Agar dapat mengerahkan dunia di sekitarnya, Amerika Serikat menggunakan bendera "Tata Dunia Baru" (*new world*

---

<sup>37</sup> Al-Ahram Weekly," *opcit*, hal. 1

order) dimana pada akhirnya seolah-olah PBB yang akan memikul peran sentral dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional. Dibawah bendera baru itu, Dewan Keamanan PBB atas dorongan Amerika Serikat mengeluarkan resolusi-resolusi penting atas Irak<sup>38</sup>. Bab VII Piagam PBB untuk pertama kalinya digunakan untuk memberikan sanksi yang sangat keras dan komprehensif terhadap sebuah negara anggota PBB. Dengan resolusi tersebut, Amerika Serikat berhasil memperoleh mandat untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Irak, sehingga Amerika Serikat dapat memonopoli manajemen krisis dalam mengakhiri krisis akibat invasi Irak terhadap Kuwait. Sejak saat itu beberapa pengamat mengatakan bahwa Irak telah dijadikan batu loncatan Amerika Serikat bagi hegemoni globalnya mulai dari Timur Tengah.

Opini Al-Ahram tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan PBB untuk mewujudkan kepentingan dan strategi globalnya. Amerika Serikat berhasil memenuhi kepentingannya dengan memanfaatkan Dewan Keamanan PBB dimana Amerika Serikat menjadi anggota tetap yang memiliki Hak Veto. Amerika Serikat juga berupaya memperoleh dukungan internasional untuk menggunakan kekuatannya militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dalam situasi yang demikian, tidak ada pilihan lain bagi PBB untuk merestui tindakan Amerika Serikat. Dari penjelasan Al-Ahram tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa interdependensi yang terjadi antara PBB dan Amerika Serikat dalam mengakhiri invasi Irak terhadap Kuwait hanyalah desepsi Amerika Serikat dalam upaya mewujudkan kepentingan dan strategi globalnya.

Artikel kedua yang menarik dalam studi pustaka dalam penelitian ini adalah Laporan National Committee on American Foreign Policy yang berjudul *"UN-US Relation 2007: The Role of The United States in The UN"*. Laporan itu menegaskan bahwa peranan Amerika Serikat dalam PBB didorong oleh adanya perbedaan premis keduanya, yaitu kepentingan nasional Amerika Serikat dan kepentingan internasional PBB. Dalam sejarah PBB dan dalam setiap masalah internasional yang muncul, kepentingan PBB dan kepentingan Amerika Serikat seringkali bersamaan. Namun ketika kepentingan keduanya bersatu, maka kredibilitas dan kapabilitas keduanya berkurang. Kerjasama Amerika Serikat dan PBB akan meningkatkan tekanan sentrifugal terhadap pengaruh Amerika Serikat dan berpotensi bagi PBB untuk menghambat tindakan

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 2

Amerika Serikat, sehingga menimbulkan “kerjasama benci tapi rindu” (*love-hate relationship*).<sup>39</sup>

Ada tiga model peranan Amerika Serikat dalam organisasi PBB selama ini, yaitu: Pertama, mitra kerjasama (*Engaged Partner*) hal ini terjadi apabila Amerika Serikat memberikan kontribusi berupa sumberdaya, partisipasi aktif dan mengizinkan PBB untuk melaksanakan tindakannya tanpa halangan; kedua, kerjasama konvergen (*Convergent Cooperation*), terjadi bila Amerika Serikat mengarahkan dan mengendalikan PBB untuk mencapai hasil tertentu. Model ini dilaksanakan karena adanya pengakuan atas perbedaan yang memerlukan persetujuan sementara, disamping adanya perbedaan kepentingan jangka panjang; dan yang ketiga, saingan jauh (*Distant Rival*), terjadi bila Amerika Serikat memandang bahwa PBB tidak akan memfasilitasi hasil yang ingin dicapainya. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu bahwa PBB adalah tidak penting dan bukan tantangan nyata bagi Amerika Serikat. Sedangkan pandangan yang lain menyatakan bahwa PBB adalah penting, tapi merupakan rintangan bagi Amerika Serikat. Namun kedua pandangan ini didasari bahwa Amerika Serikat berupaya mengurangi peran PBB dan meyakinkan pihak lain bahwa kerusakan organisasi PBB akan membawa inefektifitas PBB.

Upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990 merupakan kebangkitan hubungan kerjasama PBB dan Amerika Serikat. Ancaman dari pasokan minyak yang dikuasai oleh Irak diprediksikan akan mempengaruhi kepentingan internasional saat itu. Oleh karena itu kerjasama politik PBB dengan operasi militer Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait memperoleh dukungan internasional yang sangat kuat. Dari kacamata Amerika Serikat, PBB telah menjadi mitra utama dalam pembagian beban pada perang melawan Irak dan mendorong berbagai negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun dan melaksanakan operasi militer dalam rangka mengusir Irak dari Kuwait.<sup>40</sup>

Laporan *National Committee on American Foreign Policy* diatas menunjukkan adanya pandangan bahwa dalam upaya mengakhiri invasi Irak terhadap Kuwait, telah terjadi sebuah kerjasama dan interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat. Dalam kerjasama dan interdependensi tersebut PBB secara politik menyiapkan resolusi-resolusi yang harus dipatuhi oleh Irak. Salah satu resolusi yang sangat keras adalah

---

<sup>39</sup> National Committee on American Foreign Policy, *UN-US Relation 2007: The Role of The United States in The UN*, Round Table Report, New York City, May 7, 2007, hal. 11

<sup>40</sup> Ibid, hal. 18

resolusi 678 Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Di lain pihak, Amerika Serikat dengan alasan atas permintaan Saudi Arabia dan Kuwait membangun kekuatannya di Kawasan Teluk, namun Amerika Serikat tidak mempunyai mandat untuk menggunakan kekuatan militernya. Dengan demikian terjadilah kerjasama dan interdependensi antara PBB dan Amerika yang pada akhirnya dapat menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait, mengembalikan legitimasi Pemerintahan Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Kawasan Timur Tengah.

### **G. Asumsi.**

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi, kredibilitas dan kapabilitasnya PBB berupaya sekuat tenaga sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. PBB akan mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang diperlukan dan mengimplementasikannya untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
2. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa akan merasa terancam kepentingan nasional, hegemoni dan kredibilitasnya di Timur Tengah atas tindakan Irak menginvasi Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat dengan segala kekuatan dan kemampuannya berupaya untuk mengusir Irak dari Kuwait. Amerika Serikat juga didukung oleh negara-negara sekutunya dan dunia internasional.

### **H. Hipotesis**

1. Dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait terjadi kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat, karena PBB membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan sekaligus mengimplementasikannya, dan Amerika Serikat membutuhkan dukungan PBB untuk melakukan tindakan militer terhadap Irak.

2. PBB yang bertanggungjawab atas keamanan dan perdamaian internasional berupaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Namun upaya PBB tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan Amerika Serikat. Dalam hal ini PBB harus bekerjasama dengan Amerika Serikat agar dapat menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

3. Invasi Irak terhadap Kuwait telah mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah, sehingga Amerika Serikat berupaya mengusir Irak dari Kuwait untuk menjaga kepentingannya. Upaya Amerika Serikat tidak akan berhasil tanpa dukungan dan mandat dari Dewan Keamanan PBB, sehingga Amerika Serikat harus bekerjasama dengan PBB agar dapat melakukan tindakan militer dan mengusir Irak dari Kuwait.

#### J. Model Analisis.

##### Variabel Independen

##### Variabel Dependen

###### ***Upaya Perdamaian Internasional***

- Reaksi dan Upaya Internasional
- Piagam PBB
- Upaya Perdamaian PBB

###### ***Upaya Amerika Serikat***

- Kepentingan AS di Timteng
- Upaya Amerika Serikat
- Operasi Badai Gurun

###### ***Kerjasama PBB-Amerika Serikat***

- Keterkaitan PBB-Irak
- Keterkaitan AS-Irak
- Kerjasama PBB-AS

## Penjelasan :

Variabel independen pertama adalah Upaya Perdamaian PBB. Variabel ini menggunakan indikator Reaksi dan Upaya Internasional, Piagam PBB dan Upaya Perdamaian PBB. Indikator Reaksi dan upaya Internasional menjelaskan tentang reaksi internasional terhadap tindakan dan upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Indikator Piagam PBB menjelaskan tentang Tujuan dan Prinsip-Prinsip PBB yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota PBB yang dalam hal ini telah dilanggar oleh Irak. Sedangkan indikator Upaya Perdamaian PBB menjelaskan proses resolusi konflik yang dilakukan oleh PBB dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

Variabel independen kedua menganalisis Kepentingan Nasional dan Upaya Amerika Serikat. Variabel ini menggunakan indikator Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Timur Tengah, Upaya Amerika Serikat dan Operasi Badai Gurun sebagai upaya terakhir dari PBB dan Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait. Indikator Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah diangkat dalam tulisan ini untuk menjelaskan tentang proses empirik adanya kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah sampai dengan terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait. Indikator Upaya Amerika Serikat menjelaskan bagaimana Amerika Serikat melakukan diplomasi dan lobi-lobi internasional baik secara bilateral maupun multilateral dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dalam hal ini dijelaskan bahwa upaya Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB berupaya mempengaruhi anggota Dewan Keamanan PBB agar mengeluarkan resolusi yang dapat memberikan mandat untuk melakukan tindakan militer terhadap Irak. Dalam forum Dewan Keamanan PBB nampak adanya kerjasama dan interdependensi antara Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat. Sedangkan indikator Operasi Badai Gurun menjelaskan bagaimana resolusi 678 Dewan Keamanan PBB dapat diimplementasikan oleh Amerika Serikat dan koalisi internasionalnya. Tanpa dukungan Amerika Serikat operasi militer yang diamanatkan oleh Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB untuk mengusir Irak dari Kuwait tidak dapat dilaksanakan.

Dari kedua variabel independen tersebut diatas, mengakibatkan adanya sebuah variabel dependen yaitu terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Dalam menganalisis variabel dependen ini digunakan Teori Interdependensi, Teori Keamanan Kolektif dan Teori Kolaborasi sebagai pisau analisis. Sedangkan indikator yang

digunakan dalam variabel ini adalah Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak, Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak dan Kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak menjelaskan bagaimana Irak telah melanggar Piagam PBB dan tidak mematuhi resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan bagaimana PBB merespon tindakan Irak tersebut. Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak menjelaskan adanya invasi Irak terhadap Kuwait telah mengakibatkan kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah terancam, sehingga Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk mengusir Irak dari Kuwait dalam upaya memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan menjamin kepentingan nasionalnya. Sedangkan indikator Kerjasama PBB dan Amerika Serikat menganalisis dan menggambarkan terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

#### **K. Metode Penelitian**

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu fakta tentang terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan data-data sekunder melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan penerbitan lain yang kredibel. Data-data yang diperoleh adalah data-data yang dibutuhkan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini. Data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selanjutnya dianalisis keterkaitan dan pengaruhnya dengan data dan fakta yang lainnya. Dalam menganalisis data-data dan fakta-fakta yang diperoleh, penulis melakukan analisis semua variabel yang ada, baik variabel independen maupun variabel dependen, sehingga diperoleh suatu hasil kajian yang komprehensif integral.

Dari analisis data-data dan fakta-fakta, maka akan didapatkan hal-hal penting yang merupakan agregasi dan generalisasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan. Dengan berbekal kerangka teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi penulis dapat merangkai dan menganalisis data dan fakta yang didapat dalam penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan

penelitian yang dapat menjawab permasalahan. Disamping itu penulis juga mendapatkan suatu pelajaran dari proses deskriptif analisis yang dapat disumbangkan dalam pengembangan teori dan praktek ilmu hubungan internasional.

## **L. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, studi pustaka, signifikansi penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, asumsi, model analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II : Invasi Irak terhadap Kuwait.** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait, kepentingan nasional Irak, invasi Irak terhadap Kuwait dan situasi Irak pasca invasi.

**Bab III : Upaya Perdamaian Internasional.** Bab ini membahas reaksi dan upaya internasional terhadap invasi Irak terhadap Kuwait, menjelaskan tentang Piagam PBB dan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB.

**BAB IV : Kepentingan Nasional dan Upaya Amerika Serikat.** Bab ini membahas Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dan upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengakhiri invasi Irak terhadap Kuwait termasuk di dalamnya Operasi badan Gurun yang dilancarkan untuk mengusir Irak dari Kuwait

**Bab V : Kerjasama PBB-Amerika Serikat.** Bab ini membahas dan menganalisis keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak, keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak dan analisis tentang terjadinya kerjasama PBB dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dan merupakan fokus bahasan dalam tesis ini.

**Bab VI : Kesimpulan.** Bab ini memaparkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan penjelasan tentang terjadinya kerjasama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

